El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi

P-ISSN : 1979-4967
E-ISSN : 2656-5749
Vol. 25 No. 16, Juli 2026
DOI : 10.71287
El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi

DINAMIKA PEMBAGIAN WEWENANG DALAM PENGORGANISASIAN ORGANISASI ISLAM: STUDI KUALITATIF LAZIZNU TUWIRI WETAN

Akhla Shofia Kumala[1], Jauharotina Alfadhilah[2]

[1]Universitas Nahdlatul Ulama Makhdum Ibrahim, Tuban, Indonesia; email: akhlashofiakumala@gmail.com
[2]Universitas Nahdlatul Ulama Makhdum Ibrahim, Tuban, Indonesia; email: Dhielz90@gmail.com

Keywords

Organizing, Distribution of Authority, Islamic Organization, LAZIZNU

ABSTRACT

Organizing is an important function of Islamic organizational management that regulates the division of tasks, authority, and responsibilities to achieve organizational goals. This study aims to analyze the dynamics of authority distribution in the organizing process of LAZISNU Tuwiri Wetan, particularly the relationship between formal structure, the exercise of authority, and coordination among administrators. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that task allocation follows the organizational structure and considers the abilities and experience of members. However, its implementation remains flexible, as administrators help one another when facing difficulties in carrying out their duties. Coordination is also conducted through the assignment of coin collectors, motivation provided during meetings, and the dissemination of financial reports to the community. These findings indicate that the exercise of authority depends not only on the formal structure but also on cooperation, communication, and member involvement. This study highlights the importance of clear task allocation and effective coordination in supporting the continuity of activities within Islamic organizations.

Kata Kunci:

Pengorganisasian, Pembagian Wewenang, Organisasi Islam, LAZIZNU

ABSTRAK

Pengorganisasian merupakan fungsi penting dalam manajemen organisasi islam yang mengatur pembagian tugas, wewnang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pembagian wewenang dalam pengorganisasian LAZISNU Tuwiri Wetan, khususnya hubungan antara struktur formal, pelaksanaan wewenang, dan koordinasi antar pengurus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas telah disesuaikan dengan struktur kepengurusan serta mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman anggota. Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel karena pengurus saling membantu ketika menghadapi kendala dalam menjalankan tugas. Koordinasi juga dilakukan melalui pembagian tugas juru pungut, pemberian motivasi dalam rapat, serta penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kerja sama, komunikasi, dan keterlibatan anggota. Penelitian ini menegaskan pentingnya

A. Pendahuluan

Pengorganisasian merupakan aspek penting dalam keberlangsungan organisasi Islam karena berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.[1] Melalui proses pengorganisasian, setiap anggota memperoleh tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, serta memiliki hubungan kerja yang mendukung koordinasi antaranggota. Hal ini sejalan dengan penelitian Shofiyah dan Fendy yang menjelaskan bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan program Koin NU di LAZISNU Ranting Drajat dilakukan melalui pembentukan kepengurusan dan penetapan tugas serta fungsi masing-masing anggota. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh koordinasi dan komunikasi antaranggota.[2]

Dalam praktiknya, pembagian tugas tidak selalu berjalan sesuai struktur karena setiap anggota memiliki kemampuan dan kesibukan yang berbeda. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi antaranggota. Persoalan ini menjadi penting bagi organisasi Islam berbasis masyarakat yang mengandalkan partisipasi pengurus secara sukarela. Oleh karena itu, dinamika pembagian wewenang perlu dikaji melalui struktur kepengurusan dan praktik kerja sehari-hari.

Secara ideal, setiap pengurus perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya agar kegiatan organisasi berjalan terarah. Pembagian tugas juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggota serta didukung koordinasi yang baik. Ritonga et al membahas pentingnya pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi dalam kepengurusan masjid.[3] Sementara itu, Jaya dan Suryani membahas pengorganisasian dalam perspektif Al-Qur'an sebagai proses pengelompokan kegiatan, pembentukan struktur kerja, pembagian tugas, serta penetapan sistem koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi.[4] Pembahasan tersebut menegaskan bahwa pengorganisasian memerlukan pembagian peran dan koordinasi yang jelas antaranggota.

Penelitian terdahulu mengenai pengorganisasian lembaga zakat telah membahas pembagian tugas, pengelolaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan fungsi manajemen. Linda Mauliani Purnamasari (2020) mengkaji analisis jabatan di NU Care-LAZISNU Kota Bandung, dengan fokus pada penyusunan uraian dan spesifikasi jabatan berdasarkan pedoman organisasi LAZISNU.[5] Sementara itu, Nabila

[1] Moh Masrur dan Muhammad Akmansyah, "KONSEP PENGORGANISASIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).
[2] Shofiyah dan Izmet Muhammad Fendy, "Pengelolaan Program Koin Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 83–93, https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2761.
[3] Husni Arif Ritonga, *PENGORGANISASIAN KEPENGURUSAN PADA MASJID RAYA SUMATERA BARAT*, 10, no. 1 (2023).
[4] Yusuf Hadi Jaya dkk., *PENGORGANISASIAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN*, 3, no. 2 (2023).
[5] Linda Mauliani Purnamasari, *PROSES ANALISIS JABATAN NU CARE-LAZISNU KOTA BANDUNG*, 14, no. 3 (2020).

Lailatun Najiyah, Purwanto, dan Milna Wafirah (2023) mengkaji manajemen zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU MWC Kandangan Temanggung, termasuk pembagian tugas dalam struktur kepengurusan serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.[6] Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pengorganisasian lembaga zakat, tetapi belum secara khusus berfokus pada dinamika pembentukan kepemimpinan, pertimbangan penempatan pengurus, dan penyesuaian pelaksanaan wewenang dalam organisasi tingkat ranting. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dinamika pembagian wewenang dalam pengorganisasian LAZISNU Tuwiri Wetan berdasarkan praktik yang berlangsung di lapangan.

Penelitian tersebut menjadi landasan untuk memahami pengelolaan organisasi keagamaan, tetapi memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Sebagian kajian menitikberatkan pada tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja lembaga. Sementara itu, dinamika pembagian wewenang dalam organisasi LAZISNU tingkat ranting perlu ditelaah melalui praktik pengorganisasian sehari-hari. Aspek tersebut mencakup proses pembentukan kepengurusan, pembagian tanggung jawab, dan penyesuaian tugas ketika menghadapi kendala. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada hubungan antara struktur formal dan pelaksanaan wewenang di LAZISNU Tuwiri Wetan.

LAZISNU Tuwiri Wetan dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji dinamika pembagian wewenang dalam organisasi Islam berbasis masyarakat. Penelitian ini memperhatikan proses pembentukan kepengurusan serta pertimbangan dalam penempatan anggota. Selain itu, penelitian mengkaji pelaksanaan tugas ketika pengurus menghadapi keterbatasan waktu atau membutuhkan bantuan anggota lain. Koordinasi antara pengurus, juru pungut, dan masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai hubungan antara pembagian wewenang formal dan penyesuaian tugas dalam praktik organisasi.

Penelitian ini menggunakan konsep pengorganisasian George R. Terry dalam *Principles of Management* sebagai landasan analisis. Konsep tersebut digunakan untuk memahami pengaturan pekerjaan dan hubungan wewenang dalam organisasi. Pembagian tugas dianalisis untuk melihat penetapan pekerjaan berdasarkan bidang kepengurusan. Wewenang dan tanggung jawab digunakan untuk memahami pelaksanaan peran setiap anggota. Sementara itu, koordinasi digunakan untuk mengkaji kerja sama dan penyesuaian tugas dalam kegiatan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pembagian wewenang dalam pengorganisasian LAZISNU Tuwiri Wetan. Penelitian ini mengkaji bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab diterapkan dalam struktur kepengurusan. Selain itu, penelitian menelaah proses penempatan pengurus dan koordinasi antaranggota. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana penyesuaian

[6] Nabila Lailatun Najiyah dan Milna Wafirah, "Analisis Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh di LazisNu Majelis Wakil Cabang Kandangan Temanggung," *JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN)* 03, no. 02 (2023).

tugas dilakukan ketika pengurus menghadapi kendala. Hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara struktur kepengurusan dan praktik pengorganisasian dalam organisasi Islam berbasis masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif untuk memahami dinamika pembagian wewenang dalam pengorganisasian LAZISNU Tuwiri Wetan. Objek penelitian ini adalah pembagian wewenang, pelaksanaan tugas, dan koordinasi antar pengurus. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan catatan lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus LAZISNU Tuwiri Wetan serta didukung oleh observasi dan dokumentasi yang relevan. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan proses pembentukan kepengurusan, pelaksanaan wewenang, serta faktor yang memengaruhi koordinasi organisasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum LAZIZNU Tuwiri Wetan

LAZIZNU Tuwiri Wetan berdiri pada tahun 2021. Pada awal pembentukannya, keberadaan LAZIZNU mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk penolakan dari sebagian warga. Penolakan tersebut terutama berkaitan dengan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dihimpun, khususnya mengenai kepercayaan bahwa dana tersebut akan dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Kondisi ini menjadi tantangan awal bagi pengurus dalam memperkenalkan keberadaan organisasi dan membangun kepercayaan Masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pengurus LAZIZNU Tuwiri Wetan terus berupaya mempertahankan keberlangsungan organisasi dengan mencari Solusi untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk grup komunikasi yang melibatkan pengurus LAZIZNU, ketua RT dan juru pungut sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pengelolaan keuangan. Melalui grup tersebut, informasi keuangan disampaikan kepada ketua RT untuk diteruskan kepada masyarakat melalui grup komunikasi di lingkungan RT masing-masing.

Selain itu setiap akhir tahun, para juru pungut diberikan cetakan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan informasi penerimaan dan pengeluaran dana kepada masyarakat ketika melakukan pengumpulan koin. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tidak tergabung dalam grup whatsApp atau mengalami kesulitan mengakses informasi melalui media digital. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pengurus untuk meningkatkan transparansi, memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan LAZIZNU Tuwiri Wetan.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan tujuan LAZIZNU Tuwiri Wetan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara, organisasi ini berupaya mewujudkan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola untuk mendukung program yang memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, LAZIZNU Tuwiri Wetan tidak hanya berperan dalam menghimpun dan mengelola dana, tetapi juga menjadi wadah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial demi kepentingan bersama.

Dalam menjalankan perannya di Tengah Masyarakat, LAZIZNU Tuwiri Wetan memiliki sejumlah program sosial dan keagamaan yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu program utama yang dijalankan adalah koin NU, yaitu kegiatan pengumpulan dana dari Masyarakat yang kemudian di manfaatkan untuk mendukung berbagai program organisasi. Dana yang terkumpul digunakan untuk memebantu Masyarakat yang membutuhkan antara lain, santunan kematian dan santunan bagi warga yang sakit. Selain itu, LAZIZNU Tuwiri Wetan juga menjalankan program rehabilitasi musholla dan pemberian perlngkapan untuk TPQ guna mendukung saran ibadah dan kegiatan Pendidikan keagamaan Masyarakat.

Program sosial juga dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Pada bulan Ramadhan, LAZIZNU Tuwiri Wetan memberikan santunana kepada kaum duafa serta menyediakan air minum bagi musholla yang aktif digunakan. Selanjutnya, pada bulan muharrom, organisasi ini menyelenggarakan santunan bagi anak yatim. Sementara iti, dalam rangka peringatan hari santri, LAZIZNU Tuwiri Wetan memberikan bisyaroh kepada guru TPQ didesa Tuwiri Wetan sebagai bentuk dukungan kepada para pengajar yang berperan dalam Pendidikan Al-Qur'an.

Selain menjalankan program internal, LAZIZNU Tuwiri Wetan juga menjalin Kerja sama dengan pengurus masjid desa dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pengurus LAZIZNU dalam kegiatan kurban, zakat fitrah serta acara pengajian umum yang diselenggarakan oleh masjid desa. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa peran LAZIZNU Tuwiri Eryan tidak terbatas pada pelaksanaan program organisasinya sendiri, tapi juga mencakup dukungan terhadap kegiatan keaagamaan dilingkungan masyarakat.

Pelaksanaan berbagai program LAZIZNU Tuwiri Wetan tidak terlepas dari berbagai peran pengurus dalam mengatur dan menggoordinasikan kegiatan organisasi. Struktur Kepengurusan LAZIZNU Tuwiri Wetandibentuk untuk mengatur pembagian tugas, wewnang, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan organisasi. Masa kepengurusan dalam satu periode berlangsung selama lima tahun. Struktur tersebut terdiri atas pelindung yang dijabat oleh kepala desa dan penanggung jawab yang di jabat oleh ketua ranting NU Desa Tuwiri Wetan. Dibawahnya terdapat dewan syariah yang terdiri atas empat tokoh masyarakat. Selanjutnya, kepengurusan operasional terdiri atas ketua, wakil ketua, sekertaris I san II, serta bendahara I dan II. Untuk mendukung pelaksanaan organisasi, teradapat pula beberapa devisi, yaitu devisi program dan kegiatan, devisi pengumpulan dan pendistribusian, serta devisi administrasi, komunikasi dan pelaporan.

Susunan kepengurusan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran berdasarkan kedudukan dan bidang kerja masing-masing. Pelindung dan penanggung jawab berada pada bagian yang memberikan dukungan serta arahan bagi keberlangsungan organisasi, sedangkan ketua dan jajaran pengurus menjalankan koordinasi serta pengelolaan kegiatan organisasi. Dewan syariah berperan dalam memberikan pertimbangan terkait aspek syariah, sementara setiap devisi menangani bidang kerja sesuai dengan tugasnya.

Proses Pembentukan Struktur dan Pembagian Wewenang

Pembentukan struktur organisasi merupakan proses mengatur hubungan kerja antaranggota, menentukan kedudukan setiap jabatan, serta membagi tugas dan wewenang sesuai kebutuhan organisasi. Struktur yang jelas membantu setiap anggota memahami tanggung jawabnya dan mengetahui kepada siapa koordinasi dilakukan.[7] Dalam organisasi Islam, pengorganisasian juga berkaitan dengan prinsip amanah, musyawarah, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Luthfia dan Sunarto menjelaskan bahwa struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi merupakan unsur penting dalam pengorganisasian lembaga pendidikan Islam untuk mendukung efektivitas pencapaian tujuan organisasi.[8] Dengan demikian, pembentukan struktur tidak cukup hanya dengan menentukan jabatan, tetapi juga perlu memastikan bahwa pembagian tugas dan hubungan koordinasi antaranggota berjalan dengan jelas

Berdasarkan hasil penelitian, proses pemilihan ketua LAZIZNU Tuwiri Wetan diawali dengan pengusulan bakal calon oleh anggota ranting NU. Selanjutnya, pemilihan di lakukan secara aklamasi oleh pengurus raning NU, kemudian calon ketua terpilih dilantik oleh MWC LAZIZNU Tingkat kecamatan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dalam proses pembentukan kepemimpinan organisasi. Anggota ranting NU berperan dalam mengusulkan calon, pemgurus ranting NU menentukan ketua melalui aklamasi, sedangkan MWC LAZIZNU kecamatan melaksanakan pelantikan. Jika dikaitkan dengan konsep pengorganisasian proses ini berkaitan dengan penetapan wewenang dan hubungan koordinasi antarpihak dalam organisasi.[9] Wewenang tidak hanya terlihat dari jabatan yang dimiliki, tetapi juga dari peran setiap pihak dalam proses penentuan pemimpin. Dengan demikian, pembentukan kepemimpinan LAZIZNU Tuwiri Wetan memperlihatkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam menjalankan fungsi organisasi.

Setelah ketua terpilih, pembentukan anggota kepengurusan dilakukan oleh ketua melalui musyawarah Bersama pengurus ranting NU. Berdasarkan hasil penelitian, penempatan anggota dalam struktur kepengurusan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan kesediaan calon untuk

[7] Moh Romzi dkk., "STRUKTUR DAN SISTEM ORGANISASI PENDIDIKAN ISLAM YANG DINAMIS," *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies* 3, no. 1 (2024), https://doi.org/10.69966/mjemias.v3i1.46.

[8] Anisatul Luthfia dan Sunarto Sunarto, "Pengorganisasian dalam Pendidikan Islam: Struktur Organisasi, Pembagian Tugas, dan Koordinasi dalam Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 191–97, https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i1.1499.

[9] Nurliana Nurliana, "Transformasi Masyarakat Islam Era Revolusi Industri 4.0," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2019): 107, https://doi.org/10.24014/jiik.v9i2.8389.

menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari penempatan bendahara yang telah memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan serta sekretaris yang terbiasa menangani pekerjaan administrasi. Selain mempertimbangkan kemampuan, calon anggota juga di tanya terlebih dahulu mengenai kesanggupan mereka untuk menerima tanggung jawab yang diberikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan anggota tidak dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan kesiapan individu, tetapi melalui pertimbangan terhadap kecocokan kemampuan dan kesediaan calon dengan tugas yang akan dijalankan. Jika dikaitkan dengan konsep pengorganisasian, praktik ini berkaitan dengan pembagian kerja dan penempatan personel berdasarkan kemampuan serta kebutuhan organisasi. Hartanti menjelaskan bahwa penempatan seseorang pada suatu jabatan perlu mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan karakteristik individu.[10] Prinsip ini sejalan dengan praktik di LAZISNU Tuwiri Wetan, ketika pengurus mempertimbangkan kesanggupan calon anggota sebelum memberikan tanggung jawab tertentu. Dengan demikian, pembentukan kepengurusan LAZISNU Tuwiri Wetan menunjukkan adanya upaya menyesuaikan kemampuan, pengalaman, dan kesediaan individu dengan kebutuhan organisasi.

Meskipun memiliki mekanisme pembentukan kepengurusan, proses mencari ketua LAZISNU Tuwiri Wetan tidak selalu mudah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak organisasi menyampaikan bahwa mencari calon ketua merupakan salah satu kendala dalam pembentukan kepengurusan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur organisasi secara formal belum tentu menjamin kemudahan dalam menentukan orang yang bersedia mengemban tanggung jawab sebagai ketua.

Berdasarkan hasil wawancara, kepengurusan LAZISNU dijalankan secara sukarela tanpa memperoleh gaji. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencarian calon ketua karena tidak semua orang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjalankan tanggung jawab organisasi tanpa imbalan finansial. Dalam keadaan ini, keikhlasan dan niat untuk mengharapkan rida Allah SWT menjadi nilai penting dalam menjalankan amanah kepengurusan.

Secara konseptual, keterlibatan seseorang dalam organisasi sukarela tidak selalu didorong oleh imbalan materi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh nilai pribadi, kepedulian sosial, dan keinginan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini relevan dengan penelitian mengenai relawan Muslim dalam organisasi nirlaba berbasis Islam yang mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pengalaman dan motivasi relawan.[11] Dengan demikian, kesediaan individu untuk menjadi pengurus perlu dipahami bukan hanya dari segi kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga dari motivasi dan komitmen untuk mengabdi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan kepengurusan LAZISNU Tuwiri Wetan tidak hanya berkaitan dengan penentuan struktur dan pembagian wewenang, tetapi juga dengan kesediaan

[10] Aisatun Nisa Fauziah dkk., *BENTUK-BENTUK PENEMPATAN KERJA*, 03, no. 01 (2024).

[11] Aun Faletehan dan Syaifudin Zuhri, "Faktor-Faktor yang Membahagiakan Relawan Muslim di Organisasi Nirlaba Berbasis Islam," *Journal of Islamic Management* 4, no. 2 (2024): 113–31, https://doi.org/10.15642/jim.v4i2.1655.

individu untuk mengemban tanggung jawab secara sukarela. Oleh karena itu, komitmen pribadi dan motivasi pengabdian menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan kepengurusan organisasi

Pelaksanaan Wewenang dalam Aktivitas Organisasi

Pelaksanaan wewenang dalam aktivitas organisasi merupakan proses menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota. Dalam pelaksanaannya, setiap pengurus perlu memahami batas wewenang, menjalankan tugas yang diberikan, serta berkoordinasi dengan pengurus lainnya agar kegiatan organisasi berjalan sesuai tujuan. Menurut Masruhin, Asyari, dan Elwiddah, koordinasi dalam perspektif manajemen Islam berkaitan dengan kepemimpinan partisipatif dan pendelegasian wewenang, yaitu pemberian tugas serta tanggung jawab oleh pimpinan kepada anggota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi.[12] Selain itu, pembagian tugas dan koordinasi yang jelas membantu setiap anggota memahami perannya dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi.[13] Dengan demikian, pelaksanaan wewenang tidak hanya bergantung pada kedudukan seseorang dalam struktur organisasi, tetapi juga pada kemampuan menjalankan tanggung jawab dan membangun kerja sama dengan anggota lainnya.

Pelaksanaan wewenang dalam LAZISNU Tuwiri Wetan dilakukan berdasarkan pembagian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur kepengurusan. Setiap divisi memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pembagian tugas tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku. Dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus menerapkan pola kerja yang fleksibel dengan saling membantu ketika terdapat pengurus yang berhalangan menjalankan tugas karena berbenturan dengan pekerjaan lain.

Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang dalam LAZISNU Tuwiri Wetan tidak hanya bergantung pada pembagian tugas secara formal, tetapi juga pada kesediaan antaranggota untuk membantu satu sama lain. Ketika seorang pengurus tidak dapat menjalankan tugasnya, pengurus lain dapat menggantikan untuk memastikan kegiatan organisasi tetap berjalan. Bahkan, ketua LAZISNU Tuwiri Wetan pernah terjun langsung dalam kegiatan pengumpulan koin. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang tidak hanya dilakukan melalui arahan atau koordinasi dari ketua, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan di lapangan.

Pola kerja tersebut memperlihatkan bahwa batas tugas antar pengurus dalam praktiknya dapat menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Meskipun setiap pengurus memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidangnya, pelaksanaan tugas tetap mengutamakan keberlangsungan kegiatan organisasi. Dengan

[12] Salis Masruhin dkk., *Prinsip-Prinsip Coordinating Dalam Islam*, 8, no. 2 (2022).

[13] Maulidina Akmal, *IMPLEMENTASI PENGORGANISASIAN, PEMBAGIAN TUGAS, DAN KOORDINASI PENGURUS DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN BUSTANUL MANSURIYAH*, 11 (Juni 2026).

demikian, fleksibilitas menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan waktu dan kesibukan pengurus tanpa harus menghentikan kegiatan yang sedang berjalan.

Dalam kegiatan pengumpulan Koin NU, koordinasi dilakukan melalui juru pungut yang bertugas mengambil koin dari masyarakat pada setiap akhir bulan. Berdasarkan hasil wawancara, setiap RT di Desa Tuwiri Wetan memiliki satu orang juru pungut. Pembagian ini memudahkan pengumpulan koin karena setiap juru pungut bertanggung jawab menjangkau masyarakat di wilayah RT masing-masing. Keberadaan juru pungut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program LAZISNU tidak hanya melibatkan pengurus inti, tetapi turut melibatkan pihak yang berperan langsung dalam kegiatan pengumpulan dana di masyarakat.

Selain pembagian tugas tersebut, pengurus LAZISNU Tuwiri Wetan juga berupaya menjaga semangat para juru pungut dalam menjalankan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara, dalam setiap rapat pengurus memberikan motivasi kepada juru pungut agar tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pengurus dan juru pungut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengumpulan koin, tetapi juga mencakup dukungan agar juru pungut tetap menjalankan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugasnya, juru pungut juga berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Laporan keuangan dibagikan melalui grup WhatsApp, sedangkan pada akhir tahun juru pungut memperoleh lembaran laporan yang dicetak untuk disampaikan atau dijelaskan kepada masyarakat ketika mengambil koin. Cara ini membantu masyarakat yang tidak tergabung dalam grup WhatsApp atau mengalami kesulitan mengakses informasi secara digital agar tetap dapat mengetahui laporan pengelolaan dana LAZISNU.

Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan wewenang dan koordinasi di LAZISNU Tuwiri Wetan memperlihatkan adanya perpaduan antara pembagian tugas formal dan kerja sama yang fleksibel. Struktur organisasi tetap menjadi dasar pembagian tanggung jawab, sedangkan kondisi di lapangan mendorong pengurus untuk saling menggantikan dan membantu. Pola ini mendukung keberlangsungan kegiatan organisasi, meskipun pelaksanaan tugasnya tetap menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan kemampuan pengurus**.**

Dinamika dan Faktor yang Memengaruhi Pembagian Wewenang

Dinamika pembagian wewenang dalam organisasi LAZISNU dapat terlihat dari bagaimana pengurus menjalankan tugas, berkoordinasi, dan menyesuaikan tanggung jawab ketika menghadapi kendala. Dalam pelaksanaannya, pembagian wewenang tidak hanya bergantung pada struktur kepengurusan, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan pengurus menjalankan tugasnya. Ketika jumlah pengurus terbatas atau koordinasi kurang berjalan dengan baik,

pelaksanaan tugas dapat terhambat sehingga diperlukan kerja sama dan penyesuaian pembagian pekerjaan.[14]

Sementara itu, Riyono menekankan pentingnya pengaturan wewenang dan koordinasi dalam desain organisasi. Dengan demikian landasan untuk memahami bagaimana pembagian wewenang diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi organisasi.[15]

Pembagian wewenang dalam LAZISNU Tuwiri Wetan tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan kebutuhan organisasi dalam menjalankan kegiatan. Setiap pengurus telah memiliki tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan tugas tersebut bersifat fleksibel. Ketika seorang pengurus tidak dapat menjalankan tugas karena berbenturan dengan pekerjaan lain, pengurus lain dapat menggantikannya agar kegiatan organisasi tetap berjalan. Bahkan, ketua juga pernah terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan koin di masyarakat

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian wewenang di LAZISNU Tuwiri Wetan memiliki dinamika antara pembagian tugas secara formal dan pelaksanaan tugas di lapangan. Secara formal, setiap pengurus memiliki tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam praktiknya terdapat kerja sama yang memungkinkan pengurus saling membantu. Dengan demikian, pembagian tugas tidak menjadi batas yang kaku bagi pengurus untuk terlibat dalam pekerjaan di luar bidangnya ketika organisasi membutuhkan bantuan.

Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika tersebut adalah kesibukan pengurus di luar organisasi. Kegiatan LAZISNU dijalankan bersamaan dengan pekerjaan dan aktivitas pribadi masing-masing pengurus. Keadaan ini membuat pelaksanaan tugas perlu menyesuaikan ketersediaan waktu pengurus. Oleh karena itu, kesediaan pengurus lain untuk menggantikan atau membantu menjadi penting agar kegiatan organisasi tidak terhambat. Keterlibatan ketua dalam pengumpulan koin juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Faktor lainnya adalah proses pembentukan kepengurusan yang mengutamakan musyawarah serta mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman calon pengurus. Dalam penempatan anggota, pengurus mempertimbangkan kesesuaian kemampuan dengan tanggung jawab yang akan diberikan. Misalnya, bendahara dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman dalam bidang keuangan, sedangkan sekretaris mempertimbangkan pengalaman dalam pekerjaan administrasi. Calon pengurus juga ditanya terlebih dahulu mengenai kesediaannya menerima tanggung jawab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

[14] Intan Putri Nazila, *Strategi KOIN NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfaq*, 6, no. 1 (2023).

[15] Ayu Sri Utami dan Mia Mauliana, "DETERMINASI PENDELEGASIAN: TUGAS, WEWENANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LITERATURE REVIEW PENGANTAR MANAJEMEN MSDM)," *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2022): 489–99, https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1112.

pembagian wewenang tidak hanya berkaitan dengan penetapan jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan anggota dalam menjalankan tugas.

Meskipun demikian, proses mencari ketua dan pengurus tidak selalu mudah. Sifat kegiatan organisasi yang dijalankan secara sukarela menjadi salah satu tantangan dalam memperoleh orang yang bersedia menerima tanggung jawab. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan organisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kesediaan anggota untuk terlibat dan menjalankan tugasnya. Apabila kesediaan tersebut terbatas, organisasi perlu mengandalkan kerja sama antaranggota agar kegiatan tetap terlaksana.

Berdasarkan temuan tersebut, dinamika pembagian wewenang di LAZISNU Tuwiri Wetan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kesibukan pengurus, kemampuan dan pengalaman anggota, proses musyawarah dalam pembentukan kepengurusan, serta kesediaan pengurus untuk menjalankan tanggung jawab secara sukarela. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa pembagian wewenang merupakan proses yang tidak berhenti ketika struktur organisasi terbentuk, tetapi terus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, keberlangsungan organisasi didukung oleh pembagian tugas yang jelas sekaligus kemampuan pengurus untuk bekerja sama dan saling membantu ketika menghadapi keterbatasan di lapangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian wewenang dalam LAZISNU Tuwiri Wetan dilakukan melalui struktur kepengurusan dengan pembagian tugas sesuai bidang masing-masing. Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel karena pengurus dapat saling membantu ketika terdapat kendala dalam menjalankan tugas. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh kesibukan pengurus, kemampuan dan pengalaman anggota, serta kesediaan untuk menjalankan tanggung jawab secara sukarela. Dalam pelaksanaan kegiatan, koordinasi dilakukan melalui pembagian tugas juru pungut di setiap RT, pemberian motivasi dalam rapat, dan penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat melalui grup WhatsApp maupun lembaran cetak. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang di LAZISNU Tuwiri Wetan tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kerja sama, komunikasi, dan keterlibatan pengurus dalam menjaga keberlangsungan kegiatan organisasi.

Daftar Pustaka

Akmal, Maulidina. IMPLEMENTASI PENGORGANISASIAN, PEMBAGIAN TUGAS, DAN KOORDINASI PENGURUS DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN BUSTANUL MANSURIYAH. 11 (Juni 2026).

Anisatul Luthfia dan Sunarto Sunarto. "Pengorganisasian dalam Pendidikan Islam: Struktur Organisasi, Pembagian Tugas, dan Koordinasi dalam Lembaga Pendidikan Islam." Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial 3, no. 1 (2024): 191–97. https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i1.1499.

Faletehan, Aun, dan Syaifudin Zuhri. "Faktor-Faktor yang Membahagiakan Relawan Muslim di Organisasi Nirlaba Berbasis Islam." Journal of Islamic Management 4, no. 2 (2024): 113–31. https://doi.org/10.15642/jim.v4i2.1655.

Fauziah, Aisatun Nisa, Nela Budi Ekasari, dan Dinda Wahyu Dwi Hartanti. BENTUK-BENTUK PENEMPATAN KERJA. 03, no. 01 (2024).

Jaya, Yusuf Hadi, Asnil Aidah Ritonga, Elin Suryani, Muhammad Ridho, Al Fattah, dan Rolin Fadilah Hasibuan. PENGORGANISASIAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN. 3, no. 2 (2023).

Masruhin, Salis, Suaidi Asyari, dan Minnah Elwiddah. Prinsip-Prinsip Coordinating Dalam Islam. 8, no. 2 (2022).

Masrur, Moh, dan Muhammad Akmansyah. "KONSEP PENGORGANISASIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13, no. 1 (2020).

Najiyah, Nabila Lailatun, dan Milna Wafirah. "Analisis Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh di LazisNu Majelis Wakil Cabang Kandangan Temanggung." JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) 03, no. 02 (2023).

Nazila, Intan Putri. Strategi KOIN NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfaq. 6, no. 1 (2023).

Nurliana, Nurliana. "Transformasi Masyarakat Islam Era Revolusi Industri 4.0." Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no. 2 (2019): 107. https://doi.org/10.24014/jiik.v9i2.8389.

Purnamasari, Linda Mauliani. PROSES ANALISIS JABATAN NU CARE-LAZISNU KOTA BANDUNG. 14, no. 3 (2020).

Ritonga, Husni Arif. PENGORGANISASIAN KEPENGURUSAN PADA MASJID RAYA SUMATERA BARAT. 10, no. 1 (2023).

Romzi, Moh, Ansori Ansori, Shobihatul Fitroh Noviyanti, dan Mohamad Kamil Salas. "STRUKTUR DAN SISTEM ORGANISASI PENDIDIKAN ISLAM YANG DINAMIS." Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies 3, no. 1 (2024). https://doi.org/10.69966/mjemias.v3i1.46.

Shofiyah, dan Izmet Muhammad Fendy. "Pengelolaan Program Koin Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat." Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics 7, no. 1 (2024): 83–93. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2761.

Sri Utami, Ayu dan Mia Mauliana. "DETERMINASI PENDELEGASIAN: TUGAS, WEWENANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LITERATURE REVIEW PENGANTAR MANAJEMEN MSDM)." JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL 3, no. 2 (2022): 489–99. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1112.